

## Catatan Buku New Deals for Papua

---



**M. Mas'ud Said**

### **Pendahuluan**

Setelah mendengar bahwa Velix V Wanggai mengumpulkan tulisan dan pemikirannya dalam buku, saya sebagai sahabat, lalu berharap, bahwa tulisan itu segera saja diterbitkan. Kenapa? Sebab dalam pikiran saya, pasti ada harapan baru dari kumpulan tulisan itu. Harapan baru itu telah lama tercermin dari diskusi sehari-hari Velix dengan penulis sewaktu tokoh muda kelahiran Papua ini di tahun-tahun 2002-2004 menempuh dan menyelesaikan Masters di Flinders University – Adelaide – Australia.

Harapan baru itu bukan karena soal kedekatan pribadi, tapi muncul sebagai kelanjutan dari catatan aktifitas keseharian, terasakan dalam *mood* dan arah tulisan terdahulunya mengenai harapan, impian dan *genuine desire* penataan kembali Papua.

Pernah suatu hari, di sebuah pertemuan PPIA (Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia), Velix digoda teman-teman soal kemungkinan hubungan Jakarta – Papua apabila kelak nanti yang bersangkutan diandaikan menjadi *Gubernur Papua*. ”Apakah Papua akan renggang dengan Jakarta dan bahkan merdeka ha ha?. Dengan mantap, ia menjawab: ”Oh tidak, pasti ada format yang jauh lebih baik untuk menata kembali Papua dalam konteks kebangsaan kita. Saya yakin, soal Papua bukan saja soal Jakarta, tapi juga soal penataan sosial, ekonomi, infrastruktur dan pendidikan bagi rakyat Papua”, jelasnya.

### **Penataan Papua dan *le desire d’etre ensemble*”**

Pada saat situasi sekarang ini, keyakinan kebersamaan dan kebangsaan, sangat besar maknanya. Teorinya mengatakan, sebuah bangsa terwujud dan kuat apabila memiliki syarat apa yang disebut oleh Soekarno – mengikuti pendapat Ernest Renan - “*le desire d’etre ensemble*” atau kehendak akan bersatu. Soekarno mengingatkan syarat kuatnya bangsa didasarkan pada keinginan setiap elemen masyarakat untuk bersatu.

Sebagaimana kita ketahui, salah satu kebutuhan mendesak sebelum grand design penataan Papua dilaksanakan ialah pentingnya kehendak untuk bersatu dan menyatu.

Dalam konteks seperti itulah arti pemikiran Velix Wanggai dipertimbangkan sebagai bagian dari perspektif baru membangun Papua. Juga, suatu hari Velix menelepon saya untuk ikut bertemu Presiden RI membicarakan laporan anak-anak muda yang sedang dan telah membaca situasi lapangan di Australia terkait permintaan suaka politik puluhan warga Papua kepada pemerintah Australia. Kepada Presiden SBY, Velix dan kami ingin meyakinkan bahwa diplomasi kita, mestinya, juga mempertimbangkan suara hati rakyat, yaitu perbaikan pembangunan dan keadilan serta kesejahteraan rakyat Papua. Intinya Velix memang bersemangat untuk memikirkan dan mengikuti aspek strategis perkembangan daerahnya.

Dengan kata lain penataan kembali Papua dengan berbagai dimensinya, sebagaimana yang ia tuliskan, adalah bagian penting dari diplomasi kita, sehingga tak ada alasan lagi orang Papua meminta suaka politik karena merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusatnya, oleh pemimpin negaranya, Indonesia. Diplomasi itu kemudian ia namakan dengan *student based diplomacy*, dimana para pelajar dan mahasiswa yang jumlahnya puluhan ribu di Australia dan di berbagai negara lainnya ikut serta menjelaskan, meyakinkan orang-orang dan pemerintah Australia bahwa sebagian besar berita buruk yang dikabarkan oleh media tidak selalu sah dalam kenyataannya di Indonesia. Bandingkan saja dengan sedikit orang yang ada di kedutaan RI di Sydney dan beberapa perwakilannya.

Dalam pembangunan bangsa, sangatlah penting apa yang disebut dengan ‘mitos integrasi total’, yakni kesempurnaan keadaan harmonis tanpa konflik atau antagonisme, di mana setiap individu melebur dalam suatu komunitas yang lebih besar. Dalam konteks Papua dan propinsi NAD dibutuhkan besarnya perasaan adil, karena ia akan memupuk harmoni. Harmoni dalam keadaan yang sempurna, tidak ada antagonisme atau konflik, sulit diwujudkan tanpa keseriusan seluruh pimpinan negara untuk meratakan pembangunan dan hasil hasilnya.

## **Urgency Keywords Menata Kembali Papua**

Tidak dapat dipungkiri bahwa, kumpulan tulisan Velix V. Wanggai berisi tentang beberapa kata kunci yang penting dalam rangka apa yang ia sebut sebagai re-design dan strategi penataan kembali Papua. Tentu keywords seperti yang ada dalam berbagai bab dan bagian buku ini perlu dikembangkan secara akademis lalu dicarikan jalan untuk mengaplikasikan secara praktis. Tidak mudah memang memadukan keywords teoritis dan pragmatis dalam rangkaian yang terpadu, mengingat keduanya memiliki esensi yang berbeda tatarannya. Misalnya soal otonomi asimetris bagi Papua dengan penerapan dan penyempurnaan UU 21/2001.

Umum diketahui bahwa dalam konteks internal tanah Papua, kondisinya sosio, politik dan kebudayaan sangat asimetris, -sangat kaya perbedaan-, sehingga penerapan UU 21/2001 itu membutuhkan penyelelarasan ratusan bahkan ribuan kondisi yang asimetris di Papua sendiri. Melihat Papua sebagai sesuatu yang homogen tidaklah mungkin. Dari berbagai referensi ditemukan bahwa kemajemukan Papua seakan akan ia adalah bagian negara yang sangat dalam suatu negara yang majemuk, the most diverse

province at the most diverse country. Disitulah letak komplikasi dan tantangan masalah penataan kembali Papua pada saat yang akan datang. Keywords yang ditawarkan dalam buku ini adalah masalah riil dalam konteks pembangunan Papua.

Penelusuran referensi dan analisis seperti yang telah Velix sumbangkan dalam buku ini diharapkan merubah cara pandang yang lebih mendekati nurani khalayak Papua. Pesan dari buku ini, kalau boleh saya menafsirkan, ialah pesan bagi pimpinan birokrasi bahwa perubahan perundangan, pembaharuan Peraturan Pemerintah (PP) untuk Papua, perubahan kebijakan, akan kehilangan maknanya apabila determinan penting sebagaimana yang dibahas dalam bagian bagian buku ini terabaikan bahkan tidak sempat diketahui duduk masalahnya..

### **New Deals dan Masalah Deprivasi di Papua**

Masalah lain yang diajukan oleh Velix dalam buku ini adalah New Deals for Papua. Disparitas ekonomi di Papua, dibandingkan dengan daerah lainnya dan masyarakat di negara tetangga, mudah menimbulkan apa yang disebut oleh Ted Robert Gurr (1970) dengan *relative deprivation* (deprivasi relatif). Konsep ini biasanya digunakan untuk menjelaskan terjadinya konflik dan kekerasan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dengan mengacu pada konsep deprivasi relatif, konflik dan kekerasan dipahami sebagai konsekuensi dari kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat antara ekspektasi terhadap kondisi kehidupan tertentu dengan kenyataan sesungguhnya.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang asli Papua, sedikit banyak Velix V Wanggai mungkin ingin mewakili perasaan sebagai masyarakat Papua, seperti yang hingga kini ia teliti. Secara normal, saudara saudaranya memiliki ekspektasi agar kehidupan ekonominya tidak jauh berbeda dengan warga negara Indonesia di kawasan lainnya. Tetapi ekspektasi ini tidak bisa dipenuhi karena—setidaknya menurut masyarakat yang mengalami kondisi deprivasi relatif—pemerintah dinilai tidak menaruh kepedulian terhadap mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka lalu memilih jalan konflik terhadap pihak-pihak yang dinilai menciptakan kondisi deprivasi relatif.

Solusi yang ditawarkan antara lain ialah memperkecil kondisi deprivasi relatif ini. Bentuknya ialah New Deals for Papua berupa rencana perbaikan menyeluruh kondisi Papua sebagaimana janji Inpres No 5/ 2007 yaitu 1. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan, 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, 4. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesabilitas di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan negara, dan 5. Perlakuan khusus (*affirmative actions*) bagi pengembangan kualitas sumberdaya manusia putra putri asli Papua.

Sebagai negara kepulauan dan sekaligus negara yang terus-menerus dihadapkan dengan persoalan ekonomi, Indonesia telah lama dihadapkan dengan isu disparitas. Pada tingkat global, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa kajian, beberapa negara tidak bisa menyelesaikan konflik internal, antara lain, disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam mengelola kemajemukan etnisitas yang juga bertali-temali dengan persoalan disparitas ekonomi ini.

Apabila esensi masalah Papua tidak segera dikumandangkan, untuk beberapa hal, pemerintah Indonesia bisa saja terjangkit penyakit seperti yang dirasakan oleh sebagian

masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan itu yakni keterpecahan kepribadian (*split personality*), yakni suatu kondisi kejiwaan “tidak di sana dan tidak di sini”.

Keunikan buku ini adalah genuinitas atau keaslian dari fikiran tokoh asal Papua yang telah memiliki pengalaman multi setting; sebagai birokrat pusat di Bappenas, -yang kebetulan istrinya -, Herwin Meiliantina-, adalah pegawai di Sekretariat Nagara RI, sebagai akademisi, sekaligus sebagai seorang aktifis pergerakan keagamaan yang dinamis dan santun. Dalam konteks cara berfikir pusat - daerah, sumbangan buku ini adalah setting *point of views* yang mungkin berbeda dengan buku lainnya mengenai hal yang sama.

**Prof. M. Mas’ud Said, PhD,** Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Dewan Pendiri dan Wakil Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)